

## Resolusi konflik berbasis budaya Tionghoa-Jawa di Surakarta

Annisa Istiqomah <sup>a</sup>, Delfiyan Widiyanto <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>b</sup> Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

### ABSTRAK

Upaya resolusi konflik dibangun untuk mencegah timbulnya konflik komunal di antara warga etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan upaya dalam membangun kerukunan antara etnis Tionghoa dan etnis Jawa di Kampung Pecinan, Sudiroprajan, melalui resolusi konflik berbasis budaya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik berbasis budaya di Kampung Pecinan, Sudiroprajan meliputi: 1) proses perkawinan silang antara etnis Tionghoa dan Jawa; 2) prinsip “*kumpul ra kumpul mangan*” yang selanjutnya memberikan motivasi kepada masyarakat dari etnis Jawa; 3) Bangunan yang mengolaborasikan motif dan ukiran Cina dan Jawa; 4) Berbagai upacara keagamaan yang melibatkan seluruh partisipasi etnis; 5) Pertunjukkan wayang potehi dan barongsai yang dimainkan secara bersama-sama baik oleh etnis Tionghoa maupun etnis Jawa.

### ABSTRACT

*Conflict resolution efforts were built to prevent communal conflict between ethnic Tionghoa and ethnic Javanese. The purpose of this study is to describe the efforts in building harmony between Tionghoa and Javanese ethnic groups in Kampung Pecinan, Sudiroprajan, through cultural-based conflict resolution. This research is a case study research using a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The results showed that cultural-based conflict resolution in Kampung Pecinan, Sudiroprajan included: 1) the process of cross-marriages between ethnic Tionghoa and Javanese; 2) the principle of "gathering together manganese gathering" which further provides motivation to the people of ethnic Javanese; 3) Buildings collaborating on Tionghoa and Javanese motifs and engravings; 4) Various religious ceremonies involving all ethnic participation; 5) Puppet potehi and barongsai performances that are played together both by ethnic Tionghoa and Javanese.*

### Sejarah Artikel

Diterima : 11 Desember 2019

Disetujui : 30 April 2020

### Kata kunci:

Resolusi Konflik, budaya etnis tionghoa dan etnis Jawa

### Keywords:

*Conflict resolution, Culture Ethnic Tionghoa, Javanese*

## Pendahuluan

Surakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Keberagaman masyarakat Surakarta ini dapat ditinjau dari segi komposisi masyarakat baik dari segi etnis, agama, ataupun golongan. Bahkan sejak zaman Belanda, masyarakat pun sudah terfragmentasi secara lokasi, yang artinya bahwa setiap kelompok-kelompok etnis ditempatkan pada zona-zona yang dianggap dapat mewakili kepentingannya, misalnya Kampung Pecinan di Pasar Gede Sudiropradjan dan Kampung Arab di Pasar Kliwon. Pemetaan daerah tersebut berlanjut hingga sekarang sehingga masyarakat sudah terbiasa, dan dianggap dapat menerima serta berbaur dengan berbagai etnis yang berbeda. Meskipun demikian, secara historis masyarakat Surakarta juga tidak terlepas dari adanya berbagai bentuk konflik yang berkembang. Konflik yang berkembang di Surakarta seringkali identik dengan eksistensi dua etnis yang memang secara latar belakang budaya berbeda yaitu etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Masyarakat Tionghoa datang ke Surakarta sudah sejak hampir ratusan tahun yang lalu sejak berdirinya keraton Kartasura, mereka datang ke Surakarta melalui sungai Bengawan Solo, dan kemudian mencoba

untuk mencari peruntungan dengan berjualan di sepanjang sungai di sekitar keraton Surakarta, salah satunya di daerah Sudiropradjan atau Kampung Pecinan.

Berbagai bentuk konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa pada dasarnya bukan merupakan bentuk konflik murni yang berbasis pada etnisitas yaitu dengan menguatnya sentimen antar kelompok atau paguyuban dengan mengusung label etnis Tionghoa atau etnis Jawa, tetapi lebih kepada adanya suatu kepentingan pihak luar yang memang berupaya untuk memecah belah masyarakat, terutama pada kerusuhan Mei 1998. Apabila diselidik lebih jauh maka pemicu konflik tersebut bukan berasal dari adanya sentimen antara etnis Tionghoa dan Jawa tetapi lebih pada adanya berbagai bentuk kepentingan politik. Banyak propaganda dan doktrin yang berkembang di kalangan masyarakat yang memang secara sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang secara terang-terangan mengambinghitamkan etnis Tionghoa sebagai penyebab berbagai efek kebijakan pemerintah saat itu seperti inflasi dan krisis moneter. Secara historis berbagai jenis konflik yang dihubungkan dengan kedua etnis yaitu Tionghoa dan Jawa terkadang memang masih menyisakan prasangka buruk, stereotip, dan bias yang mudah tersulut dengan berbagai kabar yang beredar sehingga berakibat pada munculnya kerusuhan seperti penjarahan, pembakaran, bahkan pemerkosaan dengan sasaran utama etnis Tionghoa pada reformasi 1998 (Baidhawiy, 2010, hal. 6).

Merujuk dari berbagai bentuk konflik dan ketegangan antara etnis Tionghoa dan Jawa tersebut maka diperlukan sebuah upaya resolusi konflik dalam mengatasi dan mencegah timbulnya konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa sebagai upaya menjaga kerukunan dan meningkatkan kohesi masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Resolusi konflik merupakan bagian integral dari proses pembangunan, keadilan sosial dan transformasi sosial (Ramsbotham et al., 2005, hal. 5). Transformasi sosial yang dilakukan hendaknya berbasis pada struktur, budaya, dan institusi yang mendasari dua kelompok yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Berghof Foundation (2012) yang menyatakan bahwa transformasi konflik berkaitan dengan struktur, budaya dan institusi mendasar yang mendorong dan mengondisikan konflik politik serta sosial yang keras (hal. 23). Artinya, bahwa bentuk resolusi konflik yang hendaknya dibangun dalam kehidupan masyarakat antara etnis Tionghoa dan Jawa dapat didasarkan pada ketiga aspek yaitu institusi atau kelembagaan, budaya, dan struktur masyarakat. Resolusi konflik yang didasarkan pada budaya tampaknya sudah berjalan efektif di Kampung Pecinan, Sudiropradjan, Surakarta. Meskipun secara historis terjadi beberapa konflik yang berlabel etnis Tionghoa dan Jawa, dan bahkan salah satunya pernah terjadi di Pasar Gedhe, Sudiropradjan, tetapi hubungan antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan tetap rukun dan damai. Guna meningkatkan kerukunan antar etnis Tionghoa dan Jawa keduanya bersepakat untuk mengurangi berbagai bentuk prasangka negatif, stereotip, dan berbagai bentuk bias antar etnis (Tionghoa-Jawa) yang dianggap dapat menimbulkan konflik dengan berbagai bentuk akulturasi budaya yang memperkuat kohesi sosial dan persaudaraan di antara sesama warga masyarakat antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan.

Berangkat dari berbagai diskursus tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya resolusi konflik berbasis budaya yang dilakukan masyarakat di Kampung Pecinan yaitu antara etnis Tionghoa dan Jawa. Upaya resolusi konflik berbasis budaya ini sudah mengakar di Kampung Pecinan sejak lama, bahkan bentuk pelabelan etnis Tionghoa dan Jawa pun sudah tidak ditemui di kalangan masyarakat karena memang keduanya sudah melakukan pembauran. Penelitian lain mengenai resolusi konflik yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairil (2012) menggambarkan upaya dalam mewujudkan perdamaian pasca konflik di Kabupaten Poso khususnya bagi anak remaja usia sekolah. Upaya yang ditempuh dalam mewujudkan perdamaian tersebut antara lain kampanye mengenai pentingnya perdamaian melalui semangat toleransi,

saling menghargai baik dalam pluralitas agama maupun pluralitas budaya dengan proses berkesinambungan baik secara fisik maupun psikis.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yaitu dari bulan Juli hingga Desember 2017. Peneliti melakukan upaya penyelidikan mengenai aktivitas masyarakat untuk mengkaji upaya resolusi konflik berbasis budaya yang dilakukan antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan serta efektivitas upaya resolusi konflik tersebut dalam mewujudkan kerukunan dan memelihara perdamaian di Kampung Pecinan, Kelurahan Sudiropradjan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga data tersebut diuji guna melihat validitas dan keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya dalam proses analisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Konflik terjadi karena adanya perbenturan atau perbedaan kepentingan di antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Konflik identik pada suatu hubungan antara kedua belah pihak yang berupaya melakukan tindakan mengganggu, menghalangi, dan menghambat. Saiti (2015) berpendapat bahwa konflik disebabkan oleh adanya ketidaksepahaman atau perbedaan dalam memandang kebutuhan dan nilai atau pertentangan dalam sebuah proyek tugas dan kebijakan (hal. 583). Sejalan dengan pendapat Saiti, Suharno (2011) mengemukakan bahwa konflik bersifat mulai dari ancaman hingga kekerasan yang menyebabkan situasi menjadi kacau, berselisih, bersengketa, saling bermusuhan, dan saling mengklaim yang bermuara pada rendahnya atau bahkan hilangnya ketertiban dalam masyarakat. Ashby & Neilsen-Hewett (2012) menyatakan bahwa konflik berhubungan dengan oposisi antara dua individu yang ditandai peristiwa penolakan, pembalasan, atau memprotes tindakan orang lain (hal. 147). Bertalian dengan hal tersebut Holsti (Ramsbotham et al., 2005) mengklasifikasikan konflik menjadi lima tipe yaitu konflik wilayah, penciptaan negara, ekonomi, simpati manusia (etnisitas atau agama), dan ideologi (hal. 37). Sedangkan konsep etnis menurut Fearon (2003) yaitu kelompok sosial yang anggotanya ditentukan oleh atribut berbasis keturunan bukan jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, ideologi atau politik (hal. 1-2). Sejalan dengan pendapat tersebut. Etnis merupakan salah satu dimensi identitas seseorang yang menonjol yang dimobilisasi untuk menandakan atribut seperti agama, linguistik, ras, atau regional (Brown et al., 2011; Wimmer, 2013).

Secara historis sebagian besar konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan salah satunya timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau perspektif dalam memandang sumber-sumber kehidupan terutama sumber ekonomi. Artinya bahwa tipe konflik yang melatarbelakangi antara etnis Tionghoa dan Jawa pada dasarnya bukan merupakan konflik yang berbasis pada simpati manusia seperti etnisitas atau agama tetapi lebih kepada persaingan dalam menguasai sumber-sumber ekonomi. Keberadaan etnis Tionghoa di Surakarta dari dulu hingga sekarang terkadang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa etnis Tionghoa cenderung eksklusif sehingga memicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat khususnya Jawa.

Berangkat dari sentimen individu yang kemudian mengarah pada menguatnya kelompok-kelompok dengan mengatasnamakan etnis maka menurut Baidhaw (2010), sejarah pertikaian konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa muncul sejak abad ke 18 (hal. 264). *Pertama*, peristiwa geger pecinan. Geger Pecinan merupakan peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap keraton Surakarta, karena keraton Surakarta waktu itu dianggap sebagai

boneka Belanda. *Kedua*, pembunuhan terhadap penduduk etnis Tionghoa pada zaman Diponegoro karena adanya kecemburuan orang-orang pribumi terhadap etnis Tionghoa karena memperoleh hak istimewa seperti pemborongan dan persewaan. *Ketiga*, pada awal abad 20 muncul konflik etnis Tionghoa dan Jawa akibat persaingan dagang yaitu antara perkumpulan *Rekso Roemekso* (Sarekat Islam) dan *Kong Sing* (perkumpulan pedagang Tionghoa). *Keempat*, pada masa pemberontakan G30S/PKI. Saat itu masyarakat pribumi menganggap bahwa banyak warga Tionghoa yang menjadi anggota BAPERKI yang secara terang-terangan mendukung PKI yang berimbas pada pengrusakan toko-toko milik warga Tionghoa. *Kelima*, kerusuhan antar etnis Tionghoa dan Jawa pada bulan November 1980 yang dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina dekat Pasar Gede. Perkelahian ini menyulut kemarahan masa yang kemudian berimbas pada pembakaran dan penjarahan toko-toko milik orang Cina oleh ribuan massa. *Keenam*, peristiwa kerusuhan Mei 14-15 Mei 1998. Kerusuhan ini dianggap kerusuhan paling kolosal di sepanjang sejarah Surakarta. Selam kerusuhan dua hari itu, korban tewas tercatat 29 orang, 307 buah bangunan terbakar meliputi toko, plaza, show room, bank, dan 2 swalayan Matahari.

Etnis Tionghoa yang secara etos kerja memang cenderung ulet dan pekerja keras menjadikan kehidupannya lebih mapan daripada orang-orang di sekitarnya sehingga hal tersebut menjadi ladang dari beberapa oknum untuk menanamkan sebuah doktrin kebencian dalam meraih kepentingan di berbagai bidang baik ekonomi, politik, maupun sosial. Sebagaimana yang terjadi pada awal abad ke 20 dengan adanya konflik etnis Tionghoa dan Jawa akibat persaingan dagang yaitu antara perkumpulan *Rekso Roemekso* (Sarikat Islam) dan *Kong Sing* (perkumpulan pedagang Tionghoa) juga konflik kerusuhan Mei 14-15 Mei 1998 dimana warga etnis Tionghoa dianggap terlalu mendominasi dalam menguasai sumber-sumber ekonomi dan dianggap sebagai biang utama dalam menyebabkan kekacauan pemerintahan saat itu terutama kebijakan ekonomi seperti inflasi dan krisis moneter. Pun selain karena adanya kecemburuan sosial etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa, maka apabila dilacak secara mendalam baik etnis Jawa dan etnis Tionghoa merupakan dua etnis yang memang sengaja dipecah belah untuk melemahkan integrasi nasional saat itu. Artinya, bahwa konflik yang terjadi di antara keduanya timbul karena adanya kepentingan politik dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan menyebarkan doktrin atau isu palsu sehingga menyulut kemarahan beberapa pihak yang berdampak pada aksi kerusuhan 1998 seperti pembakaran, pemerkosaan, pembunuhan, dan penjarahan.

Hal ini dapat dibuktikan dari temuan penelitian yang menggambarkan fakta bahwa pada saat kerusuhan pada tanggal 14-15 Mei 1998 di Kampung Pecinan, Sudiropradjan, antara etnis Tionghoa dan Jawa malah bergotong royong untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan secara bersama-sama. Warga etnis Jawa mengerahkan tenaga untuk melindungi berbagai aset yang dimiliki warga etnis Tionghoa yang berada di pinggir jalan, seperti toko, rumah, dan mobil. Upaya pembakaran dan penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhalang dan digagalkan oleh warga etnis Jawa yang berupaya membantu etnis Tionghoa dalam melindungi diri dan juga aset-asetnya. Upaya gotong royong yang dilakukan antara etnis Tionghoa dan Jawa waktu itu sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat di Kampung Pecinan khususnya dalam meningkatkan keharmonisan kehidupan. Etnis Tionghoa dan Jawa semakin hidup rukun dan menyadari bahwa mereka merupakan warga Sudiropradjan yang harus saling menjaga dan menghormati. Fakta di atas menunjukkan bukti bahwa konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa di tidak seluruhnya berasal dari basis internal etnisitas. Kedua etnis tersebut lebih menganggap bahwa mereka sebagai korban dari kepentingan-kepentingan oknum yang memang berupaya memecah belah masyarakat dengan isu SARA. Secara historis konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa memang terjadi di beberapa tempat di daerah di Surakarta. Terlebih sejak reformasi 1998 banyak daerah-daerah di Surakarta yang

menjadi sasaran dari kerusuhan masyarakat seperti pembakaran, penjarahan, pembunuhan, dan kekerasan. Saat itu yang menjadi sasaran dari amuk masa sebagian besar merupakan warga etnis Tionghoa karena dianggap banyak menguasai aset-aset kekayaan. Aset-aset kekayaan warga etnis Tionghoa seperti rumah, pabrik, mobil, atau properti-properti menjadi sasaran pembakaran masa. Bahkan dua toko swalayan matahari banyak dijarah oleh masa. Berbagai bentuk perlakuan negatif saat itu yang diterima oleh etnis Tionghoa menimbulkan kerugian baik materiel maupun moril.

Bahkan hingga saat ini diantara masyarakat etnis Tionghoa masih ada yang trauma apabila mengingat kejadian saat itu. Berangkat dari realitas tersebut maka guna menghindari dan mencegah terjadinya konflik yang melibatkan kedua etnis (Tionghoa-Jawa) maka dibutuhkan sebuah resolusi konflik yang dianggap dapat meminimalisir terjadinya konflik. Salah satu daerah di Surakarta yang menerapkan berbagai bentuk upaya sebagai wujud resolusi konflik yaitu Kampung Pecinan, Sudiropradjan, Surakarta. Kampung Pecinan terletak di sekitar Pasar Gede, menurut Sayid (2001), Pasar Gede terletak di pusat kota, diantara kampung Pecinan. Pada waktu itu uang kebersihan dan uang sewa toko menjadi penghasilan Kapten Cina, tetapi sekarang hasil tersebut masuk ke kas pemerintah Istana Surakarta (hal. 67). Komposisi masyarakat Kampung Pecinan terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas etnis Tionghoa dan Jawa. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Surakarta, kerukunan masyarakat etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan sangat terjaga, hal ini dapat terlihat dari berbagai bentuk aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh kedua etnis tersebut baik Tionghoa maupun Jawa di Kampung Pecinan. Upaya ini merupakan wujud resolusi konflik dari masyarakat di Kampung Pecinan karena mereka menyadari bahwa secara historis hubungan antara etnis Tionghoa dan Jawa banyak diselimuti prasangka negatif dan stereotip yang dinilai dapat menjadi bom waktu atau dapat menyeruak kembali apabila terdapat pemantik atau propaganda.

Upaya resolusi konflik yang dilakukan masyarakat di Kampung Pecinan antara etnis Tionghoa dan Jawa merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik di dalam kehidupan masyarakat. Wujud upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Pecinan adalah dengan melakukan berbagai bentuk kesepakatan yang dianggap dapat mengatasi ketidakcocokan. Masyarakat etnis Tionghoa dan Jawa mencoba menerima keberadaan masing-masing pihak dengan hidup berdampingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wallenstein (2015) yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan kesepakatan untuk mengatasi ketidakcocokan dan masing-masing kelompok saling menerima keberadaan masing-masing (hal. 5-7). Woodhouse & Duffey (2015) menyatakan bahwa resolusi konflik mencakup tiga tahap yaitu menyadari bentuk konflik yang terjadi, mendiagnosis sifat konflik, dan mengimplementasikan metode yang tepat dalam 1) Membaurkan energi emosional negatif pihak yang terlibat konflik; 2) Memungkinkan pihak yang terlibat konflik untuk memahami perbedaan; dan 3) Menyelesaikan perbedaan untuk mencapai solusi yang tidak dipaksakan dan disepakati oleh kedua belah pihak (hal. 34). Merujuk dari pendapat Woodhouse dan Duffey maka etnis Tionghoa dan etnis Jawa di Kampung Pecinan sudah sejak lama melakukan pembauran energi emosional negatif tanpa campur tangan pemerintah. Artinya, bahwa semenjak warga dari etnis Tionghoa datang ke Sudiropradjan, warga dari etnis Jawa bersikap terbuka tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya etnis Tionghoa. Aspek-aspek perbedaan di antara kedua belah pihak diolah sebagai upaya resolusi dalam mencegah terjadinya konflik yang kemungkinan timbul karena perbedaan pandangan atau kepentingan dalam merespons sumber-sumber kehidupan seperti politik, budaya, dan ekonomi.

Upaya resolusi konflik yang ditempuh oleh masyarakat di Kampung Pecinan lebih mengarah pada pendekatan budaya. Pendekatan secara budaya ini merupakan salah satu cara bagi etnis Tionghoa dalam beradaptasi dengan lingkungan yang mayoritas penduduknya merupakan etnis

Jawa di Sudiropadjan. Gudykunst dan Kim(1995), menyatakan bahwa terdapat dua tahap dalam proses adaptasi yaitu *cultural adaptation* dan *cross-cultural adaptation*. *Pertama, cultural adaptation* adalah suatu proses ketika individu atau kelompok berpindah ke lingkungan yang baru yang selanjutnya terjadi proses *enculturation* yaitu proses komunikasi yang dilakukan antara penduduk lokal dengan pendatang. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kampung Pecinan yang memang pada awalnya dihuni oleh penduduk dari kalangan etnis Jawa. Kemudian karena adanya gelombang krisis di Cina maka menyebabkan beberapa etnis Tionghoa melakukan migrasi ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia memang secara murni untuk mencari peruntungan dengan cara berdagang, salah satunya di Sudiropadjan yang saat ini dikenal dengan Kampung Pecinan. Saat itu banyak etnis Tionghoa yang menyusuri sungai bengawan Solo hingga sampai ke sungai yang berada di Sudiropadjan. Pasar Gede yang terletak di Sudirporadjan merupakan salah satu aspek yang menarik etnis Tionghoa untuk berdagang hingga lambat laun banyak etnis Tionghoa yang datang ke tempat tersebut. Kedatangan etnis Tionghoa di Sudipropradjan pun disambut baik oleh masyarakat etnis Jawa yang memang sejak awal sudah tinggal di Sudiropadjan terlebih dahulu. Proses penerimaan etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa merupakan keberhasilan *cultural adaptation* dalam proses *enculturation*, karena keduanya dapat berkomunikasi secara baik hingga dapat hidup berdampingan secara damai.

*Kedua, cross-cultural adaptation*. Proses *cross-cultural adaptation* meliputi tiga tahap yaitu akulturasi (*acculturation*), dekulturasi (*deculturation*), dan asimilasi (*assimilation*). Proses *cross cultural adaptation* yang terjadi di Kampung Pecinan berada dalam tahap akulturasi. Akulturasi adalah fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya berbeda masuk ke dalam kontak langsung pertama, dengan perubahan selanjutnya dalam pola budaya asli dari kedua atau kedua kelompok yang berbeda (Redfield et al., 1936; Sam & Berry, 2010). Strategi akulturasi yang meliputi asimilasi, pemisahan, marginalisasi, dan integrasi. Asimilasi melibatkan pelepasan warisan budaya seseorang dan mengadopsi budaya baru (Barry, dikutip dari Tadmor et al., 2009). Marjinalisasi adalah upaya menjauhkan diri dari budaya lama dan baru, yang kemudian melakukan integrasi, atau *biculturalism* yaitu proses mempertahankan warisan budaya dan mengadopsi identitas budaya baru. Proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang tersebut mulai memahami budaya baru itu dan memilih norma dan nilai budaya lokal yang dianutnya. Walaupun demikian, pola budaya terdahulu juga mempengaruhi proses adaptasi.

Demikian halnya yang terjadi di Kampung Pecinan, pada awalnya banyak etnis Tionghoa yang berdatangan ke Sudiropadjan untuk berdagang tetapi akhirnya lambat laun menetap di sana. Banyak etnis Tionghoa yang kemudian menikah dengan masyarakat dari etnis Jawa, sehingga kemudian terjadi berbagai proses akulturasi. Etnis Tionghoa juga membangun Klenteng (*Tien Kok Sie*) yang pada awalnya diperuntukkan sebagai tempat istirahat dan juga tempat beribadah. Etnis Tionghoa sebagai pendatang melalui proses sosialisasi dan berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Namun demikian, karena etnis Tionghoa banyak yang tinggal dan menetap di Sudiropadjan maka etnis Tionghoa mulai memahami budaya Jawa dan mengadopsi norma dan nilai budaya Jawa sebagai bagian dari budayanya. Seiring berjalannya waktu karena banyaknya etnis Tionghoa di Sudiropadjan maka pemerintah Indonesia saat itu, yang masih dikuasai oleh Belanda, memosisikan Pasar Gede atau Kelurahan Sudiropadjan sebagai zona Pecinan yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Kampung Pecinan. Kehidupan etnis Tionghoa dan Jawa tidak selamanya berjalan harmonis, meskipun di Kampung Pecinan kerukunan antara etnis Tionghoa selalu terjaga tetapi secara historis adanya pertikaian antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa di Surakarta tidak dapat dimungkiri, meskipun dari sebagian besar konflik akar masalah tidak berasal

dari kedua kelompok tersebut tetapi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang akan mengambil keuntungan dari perpecahan kedua etnis tersebut. Akibatnya, terjadinya kesalahpahaman antar kedua etnis tersebut atau disebut dengan istilah miskomunikasi budaya.

Burgos-Cienfuegos et al. (2015) mengemukakan bahwa konflik nilai lintas budaya merupakan konflik yang timbul karena adanya perbenturan nilai budaya (hal. 368). Perselisihan etnis sering disebabkan karena ketidakmampuan pihak-pihak yang konflik dalam berkomunikasi secara efektif dalam menunjukkan kepercayaan dan praktik budaya yang (Hall, dikutip Ross, 2000). Ketidakmampuan ini yang kemudian dapat menyebabkan miskomunikasi yang dikaitkan dengan kesalahan orang lain atau kekurangan kelompoknya sendiri. Merujuk dari pendapat Ross tersebut maka upaya resolusi konflik yang dilakukan antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan, Sudiropardjan yaitu melalui pendekatan budaya. Resolusi konflik melalui pendekatan budaya merupakan cara yang tepat mengingat bahwa perselisihan yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Jawa seringkali disebabkan karena kesalahpahaman individu dalam berkomunikasi dan kepercayaan dalam menunjukkan praktik budaya yang berbeda. Artinya bahwa pembauran energi negatif dan pemahaman perbedaan diantara etnis Tionghoa dan Jawa dilakukan dengan akulturasi budaya yang mencakup beberapa komponen seperti makanan, sistem perkawinan, pola pikir, dan mata pencaharian. Menurut Koentjaraningrat (2010) tujuh unsur kebudayaan antara lain bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian (hal. 23-27). Diantara ketujuh unsur kebudayaan tersebut, proses akulturasi budaya yang terjadi di Kampung Pecinan lebih menekankan pada lima unsur yaitu sistem kekerabatan atau organisasi sosial, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi serta kesenian.

*Pertama*, sistem kekerabatan atau organisasi sosial. Kekerabatan berkaitan dengan perkawinan dalam suatu masyarakat, hal ini dikarenakan perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membagi sebagian besar hidup mereka bersama-sama. Gelombang migrasi etnis Tionghoa ke Indonesia yang kemudian menetap di suatu daerah-daerah tertentu seperti di Kampung Pecinan, Sudiropardjan menyebabkan bentuk perkawinan antar etnis atau campuran. Penelitian yang dilakukan oleh Sinning & Worner (2010) menunjukkan bahwa semakin lama imigran berada di suatu negara maka semakin besar probabilitas pernikahan antar etnis (hal. 4). Sebagaimana yang terjadi dalam proses akulturasi antara masyarakat etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan, Sudiropardjan yang melakukan perkawinan campuran antar etnis sehingga terkadang ada yang disebut istilah '*hitachi*' (hitam namun China) atau '*ampyang*' (kacangnya Cina, gulanya Jawa). Perkawinan antar etnis tersebut sudah dilakukan cukup lama semenjak etnis Tionghoa mulai menetap di Kampung Pecinan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik, karena dengan begitu selanjutnya akan membaurkan pelabelan etnis Tionghoa dan Jawa karena dalam ikatan sebuah perkawinan untuk menciptakan sebuah komunitas baru yang dikenal dengan '*ampyang*' atau '*hitachi*'.

*Kedua*, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Sistem ekonomi atau mata pencaharian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Pada zaman dahulu, masyarakat pada umumnya hanya bekerja bercocok tanam atau sebagai nelayan yang kemudian lambat laun dengan meningkatnya interaksi antar individu maka masyarakat mulai melakukan sistem barter dan berdagang. Sebagaimana yang dilakukan oleh etnis Tionghoa yang menekankan pada prinsip "*kumpul ra kumpul mangan*" (kumpul tidak kumpul makan) yang berarti bahwa etnis Tionghoa mencari nafkah dengan merantau dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh etnis Tionghoa tersebut

menjadikan keberadaan etnis Tionghoa dimana-mana termasuk di Kampung Pecinan, Sudiropadjan. Prinsip hidup tersebut kemudian dipahami oleh etnis Jawa, meskipun pada dasarnya etnis Jawa lebih menekankan pada prinsip "*mangan ra mangan kumpul*" yang lebih condong berkumpul di suatu tempat untuk tidak memperluas jaringan. Namun, dengan adanya akulturasi budaya, semboyan "*kumpul ra kumpul mangan*" pun lambat laun dipahami oleh masyarakat dari etnis Jawa, sehingga kemudian mereka banyak yang bekerja sebagai pedagang, atau pengusaha, buruh gendong, tukang becak, di sekitar Pasar Gede.

*Ketiga*, sistem peralatan hidup dan teknologi. Rumah atau tempat berlindung merupakan salah satu wujud kebudayaan yang mengandung unsur teknologi. Unsur kebudayaan terlihat dari bentuk atau miniatur dari bangunan rumah yang biasanya disesuaikan dengan keadaan di sekitar rumah. Misalnya dalam masyarakat Jawa jendela rumah dibuat besar karena suhu udara yang cenderung tropis atau lembap. Selanjutnya, di Minangkabau bangunan rumah berbentuk panggung untuk menghindari serangan dari hewan buas. Namun demikian, berbagai bangunan rumah tersebut lambat laun juga mengalami perkembangan dengan masuknya berbagai budaya ke Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa bangunan yang berada di Kampung Pecinan, Sudiropadjan yang menunjukkan adanya akulturasi budaya yaitu adanya kolaborasi miniatur Tionghoa dan Jawa. Misalnya bangunan Kantor Kelurahan Sudiropadjan yang mengkolaborasikan antara miniatur Tionghoa dan Jawa. Motif Cina terlihat dari papan nama Kelurahan Sudiropadjan yang identik dengan ukiran Cina dan warna merah, sedangkan bangunan lain seperti di gedung pertemuan menggunakan sentuhan ukiran Jawa pada jendela dan atap langitnya.

*Keempat*, kesenian. Kesenian terdiri dari berbagai jenis seperti seni rupa, seni musik, seni gerak, dan/ atau seni tari. Berbagai jenis kesenian tersebut mewarnai kehidupan masyarakat sebagai sarana hiburan. Terdapat dua macam kesenian yaitu kesenian tradisional dan kesenian modern. Kesenian tradisional adalah produk seni yang digali dari kehidupan masyarakat asli Indonesia seperti wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong. Sedangkan kesenian modern adalah produk kesenian yang biasanya berasal dari budaya-budaya luar seperti film, lagu, dan koreografi. Kesenian mampu dijadikan sarana dalam meningkatkan keharmonisan antara berbagai bentuk latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat di Kampung Pecinan, Sudiropadjan, yang memiliki berbagai bentuk kesenian yang mengkolaborasikan unsur Tionghoa dan Jawa seperti wayang potehi dan barongsai. Bentuk akulturasi budaya dalam kesenian Wayang Potehi ditunjukkan dari iringan musik Wayang Potehi yaitu dengan musik tradisional Jawa yang dimainkan oleh warga dari etnis Jawa, demikian halnya pertunjukkan Barongsai yang sebagian besar dimainkan oleh masyarakat Jawa di Kampung Pecinan.

Berbagai bentuk unsur budaya yang menjadi produk akulturasi di Kampung Pecinan, baik dari sistem kekerabatan, sistem ekonomi atau mata pencaharian, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, serta kesenian merupakan upaya resolusi dalam mencegah timbulnya konflik atau gesekan antarwarga. Hal ini mengingat komposisi warga Sudiropadjan yang beragam, maka warga di Kampung Pecinan, Sudiropadjan mempertahankan kerukunan dengan proses akulturasi, karena apabila masyarakat di Kampung Pecinan, Sudiropadjan tidak memiliki sistem ketahanan yang kuat yang terwujud dalam berbagai bentuk resolusi konflik berbasis budaya, maka akan mudah terjadi gesekan. Upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat di Kampung Pecinan didasarkan pada fakta bahwa dalam beberapa kurun terakhir isu SARA merupakan isu yang dianggap mudah untuk didengung-dengungkan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pendekatan resolusi konflik berbasis budaya ini dianggap efektif karena dapat meningkatkan keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat. Resolusi konflik berbasis budaya ini meminimalisir terjadinya konflik dengan meleburkan berbagai bentuk unsur perbedaan melalui proses pembauran budaya yang terjadi selama hampir satu abad antara etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan, Sudiropadjan.



## Simpulan

Konflik antara etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta secara historis sebagian besar disebabkan oleh isu-isu atau doktrin yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat yang selanjutnya dapat melemahkan ketahanan dan integritas nasional. Upaya gotong royong dalam memberi perlindungan terhadap etnis Tionghoa dan menjaga keamanan di Kampung Pecinan Sudirporadjan yang dilakukan antar etnis Tionghoa dan Jawa saat kerusuhan reformasi 1998 merupakan upaya dalam meningkatkan keharmonisan kehidupan. Etnis Tionghoa dan Jawa di Kampung Pecinan, Sudiropradjan semakin hidup rukun dan menyadari bahwa mereka merupakan warga Sudiropradjan yang harus saling menjaga dan menghormati. Berbagai bentuk unsur budaya yang menjadi produk akulturasi di Kampung Pecinan, Sudipropradjan merupakan upaya resolusi dalam mencegah timbulnya konflik atau gesekan antarwarga. Pendekatan resolusi konflik berbasis budaya ini dianggap efektif karena dapat meningkatkan keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat. Resolusi konflik berbasis budaya ini meminimalisir terjadinya konflik dengan meleburkan berbagai bentuk unsur perbedaan melalui proses pembauran yang terjadi selama hampir satu abad antara etnis Tionghoa dan Jawa. Berbagai bentuk produk akulturasi budaya di Kampung Pecinan terwujud baik dari 1) proses perkawinan campur antar etnis Tionghoa dan Jawa; 2) kegiatan berdagang yang dilakukan oleh etnis Tionghoa yang kemudian banyak diikuti oleh masyarakat etnis Jawa serta prinsip “*kumpul ra kumpul mangan*” yang selanjutnya memberikan motivasi kepada masyarakat dari etnis Jawa; 3) Berbagai bentuk miniatur bangunan yang mengolaborasikan motif dan ukiran Cina dan Jawa; 4) Penyelenggaraan berbagai upacara keagamaan yang melibatkan seluruh partisipasi warga seperti tahlilan, imlek, *halal-bihalal*, dan hari raya Kurban; 5) Pertunjukkan wayang potehi dan barongsai yang dimainkan secara bersama-sama baik oleh etnis Tionghoa maupun etnis Jawa.

## Referensi

- Ashby, N., & Neilsen-Hewett, C. (2012). Approaches to conflict and conflict resolution in toddler relationships. *Journal of Early Childhood Research*, 10(2), 145–161. <https://doi.org/10.1177/1476718X11430070>
- Baidhaw, Z. (2010). Dinamika radikalisme dan konflik bersentimen keagamaan di Surakarta. *Studia Philosophica et Theologica*, 3(2), 258–287. <https://doi.org/10.1234510/ri'ayah.v3i02.1319>
- Berghof Foundation. (2012). *Berghof glossary on conflict transformation*. Berghof Foundation Operations GmbH.
- Brown, C. S., Alabi, B. O., Huynh, V. W., & Masten, C. L. (2011). Ethnicity and gender in late childhood and early adolescence: Group identity and awareness of bias. *Developmental Psychology*, 47(2), 463–471. <https://doi.org/10.1037/a0021819>
- Burgos-Cienfuegos, R., Vasquez-Salgado, Y., Ruedas-Gracia, N., & Greenfield, P. M. (2015). Disparate cultural values and modes of conflict resolution in peer relations: the experience of latino first-generation college students. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 37(3), 365–397. <https://doi.org/10.1177/0739986315591343>
- Fearon, J. D., & Stanford, D. D. L. (2003). War ethnicity, insurgency, and civil war. *American Political Science Review*, 97(1), 75–90.
- Gudykunst, W., & Kim, Y. Y. (1995). Communicating with strangers: An approach to intercultural communication. In J. Stewart (Ed.), *Bridges Not Walls*, (6th ed., hal. 429–442). McGraw-Hill.
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan.
- Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2005). *Contemporary conflict resolution*. Polity Press.
- Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum for the study of acculturation. *American Anthropologist*, 38(1), 149–152. <http://www.jstor.org/stable/662563> .

- Ross, M. H. (2000). Creating the condition for peacemaking: Theories of practice in ethnic conflict resolution. *Ethnic and Racial Studies*, 23(6), 1001–1034.
- Saiti, A. (2015). Conflicts in schools, conflict management styles and the role of the school leader: A study of Greek primary school educators. *Educational Management Administration and Leadership*, 43(4), 582–609. <https://doi.org/10.1177/1741143214523007>
- Sam, D. L., & Berry, J. W. (2010). Acculturation: When individuals and groups of different cultural backgrounds meet. *Perspectives on Psychological Science*, 5(4), 472–481. <https://doi.org/10.1177/1745691610373075>
- Sayid, R. (2001). *Babad Sala (Diterjemahkan oleh Darweni)*. Kantor Perpustakaan Reksopustoko Istana Mangkunagaran & PT Unilever Indonesia.
- Sinning, M., & Worner, S. (2010). *Inter-ethnic marriage and partner satisfaction* (No. 221; Ruhr Economic Papers,).
- Suharno. (2011). *Politik rekognisi dalam peraturan daerah tentang penyelesaian konflik di dalam masyarakat multikultural*. Universitas Gadjah Mada.
- Tadmor, C. T., Tetlock, P. E., & Peng, K. (2009). Acculturation strategies and integrative complexity: The cognitive implications of biculturalism. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 40(1), 105–139. <https://doi.org/10.1177/0022022108326279>
- Wallensteen, P. (2015). *Understanding conflict resolution* (4th ed.). SAGE Publications Limited.
- Wimmer, A. (2013). *Ethnic boundary making: Institutions, power, networks*. Oxford University Press.
- Woodhouse, T. (2015). *Peacekeeping and international conflict resolution* (H. J. Langholtz (ed.)). Peace Operations Training Institute.